

HISTORIOGRAFI BELANDASENTRIS: PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGANNYA

OLEH: Abdul Syukur

Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak

Historiografi Belandasentris adalah sebuah perspektif sejarah yang pernah dikembangkan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Sesuai dengan namanya, historiografi ini memusatkan perspektifnya terhadap peranan bangsa Belanda dalam membangun wilayah koloninya. Dimulai dengan pelayaran kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Kapten Kapal Cornelis de Houtman yang berhasil mencapai Pelabuhan Banten pada tahun 1595 untuk mencari rempah-rempah. Dari Banten, mereka menuju wilayah timur Indonesia hingga berlabuh di Peraian Maluku. Tujuh tahun kemudian para pedagang Belanda membentuk VOC (Vereedigde Oost Indische Compagnie), sebuah kongsi dagang untuk berdagang di wilayah Hindia Timur yang terbentang antara Tanung Harapan di Afrika hingga Selat Magelhaes. Dari VOC pemerintah Belanda membangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia (sekarang Jakarta). Keberhasilan inilah yang dikisahkan dalam historiografi Belandasentris. Tulisan ini menelusuri asal mula pertumbuhan gagasan historiografi Belandasentris: Bagaimana proses perumusannya dan siapakah yang menggagas dan mengembangkannya ?

Pendahuluan

Terbentuknya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Keberadaan bangsa Belanda ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan yang dilakukan para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Kongsi dagang ini mendapatkan dukungan politik maupun militer dari pemerintah Belanda. Bahkan mereka diberikan hak-hak politik atas nama Kerajaan Belanda untuk menyatakan perang atau berdamai dengan para sultan di wilayah perdagangannya yang menolak sistem perdagangan monopoli.

Pimpinan tertinggi VOC disebut *Bewindhebbers* (Pemilik Kekuasaan)

yang berjumlah 73 orang. Sementara pengurus hariannya dipimpin oleh *Heeren Seventien* (Tujuh Belas Pimpinan). Struktur kepengurusannya dilengkapi pada tahun 1609 dengan membentuk *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal) yang dijabat oleh satu orang dan *Raad van Indie* (Dewan Penasehat Hindia) yang beranggotakan 9 orang, di antaranya adalah Direktur Jenderal, yakni bawahan Gubernur Jenderal. Dapat disimpulkan bahwa Gubernur Jenderal menjalankan tugas eksekutif, sementara Raad van Indie melakukan tugas-tugas yudikatif.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama adalah Pieter Both, seorang pensiunan perwira Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang

pernah bekerja di VOC mewakili kepentingan Kerajaan Belanda. Ia segera memindahkan kantor pusat perdagangan VOC dari Pelabuhan Banten ke Ambon di Maluku. Saat itu Maluku dikenal sebagai pusat tanaman cengkih terbaik.

Satu dasawara kemudian, kantor pusat perdagangan VOC dipindahkan oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen van Hoorn pada tahun 1622 ke Pelabuhan Jayakarta yang saat itu berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dan berbatasan langsung dengan Kesultanan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah. Coen mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Ia menjabat Gubernur Jenderal VOC dua kali yakni periode 1619-1623 dan 1627-1629. Dalam periode kedua itulah kota Batavia dikepung oleh pasukan Kesultanan Mataram pada tahun 1628 dan 1629. Namun Batavia tidak berhasil dikuasai, meskipun Coen sakit keras akibat pengepungan itu dan bahkan meninggal dunia di dalam benteng. Lima belas tahun kemudian, perdamaian Batavia dan Mataram dirintis dengan bertukar hadiah sebagai tanda persahabatan.

Pola hubungan VOC dengan Mataram segera berubah setelah kekuatan militer Mataram terus melemah sejak dipimpin Sultan Amangkurat II (1677-1703). Kekuasaannya hampir runtuh dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Untuk menghadapinya, Sultan meminta bantuan pasukan VOC di Batavia. Sebagai imbalannya, Sultan menyerahkan pelabuhan Semarang dan hak monopoli perdagangan madat dan tekstil kepada VOC. Daerah lain

yang diserahkan Mataram kepada VOC adalah Jepara, Surabaya, Rembang, Demak dan Tegal sebagai imbalan bantuan VOC membantu Mataram menghancurkan pemberontakan Untung Surapati.

Ketergantungan Mataram kepada bantuan militer VOC bertambah pada masa Sultan Amangkurat III (1703-1708). Ia kesulitan mengatasi pemberontakan. Sebagai imbalannya, VOC memperoleh Priangan, Cirebon dan Madura bagian timur. Kekuasaan VOC di Madura meluas setelah bagian baratnya diserahkan Mataram kepada VOC karena membantu menghancurkan pasukan Cakraningrat, seorang penguasa Madura yang memberontak kepada Mataram.

Kebijakan Mataram yang semakin memperbesar peranan VOC adalah penunjukan Gubernur Jenderal VOC sebagai penengah antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Kebijakan ini ditempuh oleh Pakubuwono II pada tahun 1743. Untuk mencegah perang saudara, Gubernur Jenderal VOC membagi wilayah Mataram menjadi dua kesultanan yakni Kesultanan Surakarta untuk Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta untuk Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengbubuwono I, sementara Mas Said diberi gelar Paku Alam dan diberi wilayah khusus. Keputusan ini dikuatkan melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755.¹

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, edisi penerbitan, h. 47-50. Lihat juga Luc Nagtegaal, 1996, *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and*

Kesuksesan VOC menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Mataram di Pulau Jawa, tetapi tidak menyelamatkannya dari kebangkrutan. Pada tahun 1799 pemerintah Belanda mengambilalih seluruh kekayaan VOC karena tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Pergantian dari VOC ke Kerajaan Belanda ini menggeser tujuan keberadaan bangsa Belanda di Hindia Timur dari sekedar meraih keuntungan ekonomi menjadi politik dan ekoomi. Seluruh wilayah perdagangan VOC oleh Kerajaan Belanda dijadikan sebagai daerah koloninya. Di bawah program pasifikasi, wilayah koloni diperluas ke luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Irian Barat. Seluruh wilayah yang terpisah-pisah ini disatukan sebagai bagian dari Kerajaan Belanda di Eropa, dan dinamakan sebagai koloni Hindia Belanda.

Membentuk visi masa lalu: Mazhab Batavia

Keberhasilan Belanda membangun koloni di Hindia Timur membuat mereka sangat membutuhkan pembentukan visi masa lalu yang mengukuhkan kekuasaannya. Berdasarkan kepentingan inilah mereka mendorong pembentukan historiografi Belandasentris yang dikembangkan pertama kali oleh sekelompok sejarawan yang bekerja sebagai arsiparis. Pelopor utamanya J.K.J. De Jonge (1828-1879) yang bekerja pada Arsip Kerajaan Belanda sejak tahun 1854. Setelah 8 tahun

bekerja, ia menerbitkan 10 jilid seri dokumen pertumbuhan kekuasaan Belanda di Hindia Timur.² Keberhasilan De Jonge memberikan inspirasi Kepala Arsip Negara di Batavia, F. de Han (1863-1938) untuk menyusun sejarah Batavia dan Priangan dengan memanfaatkan arsip-arsip yang ditulis oleh para pejabat VOC.³ Keberhasilannya memperkuat kedudukan para sejarawan yang menjadikan arsip sebagai satu-satunya sumber primer. Karena seluruh arsip yang dikumpulkan pemerintah kolonial hanya mengisahkan kegiatan orang-orang Eropa yang bekerja sebagai pejabat VOC maupun pemerintah kolonial, maka hasil penelitian yang bersandar pada arsip menjadi bersifat Belandasentris. Kecenderungan ini mengakibatkan tersingkirnya peranan Bumiputera dalam sejarah wilayahnya sendiri karena kegiatan mereka tidak terdokumentasikan di dalam arsip VOC maupun pemerintah kolonial.

Karya De Jonge dan De Han menjadi semacam panduan bagi penulis-penulis sejarah lainnya pada

² H.J. De Graaf, 1971, *Historiografi Hindia Belanda*, (Jakarta: Bhratara), h. 13. Buku ini merupakan makalah De Graaf dalam bahasa Belanda yang diterbitkan pada tahun 1940 dalam *Kolonial Tijdschrift*, "Nederlandsch-Indische historiographie". Makalahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh C.P.F. Luhulima dengan pengawasan Dewan Redaksi Panitia Seri Terjemahan Karangan-Karangan Belanda yang diketuai Prof.Dr. Koentjaraningrat dengan panitera Drs. J.W. Minderhout dan anggota terdiri dari: Dr. Taufik Abdullah, Harsja W. Bachtiar, Achmad Djayusman, A.B. Lopian, Drs. Machmudi Mangkudilaga, dan Nj. Maria Ulfah Subadio, S.H. Penerjemahan ini merupakan kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV).

³ Ibid., h. 24.

the northeast coast of Java 1680-1743, Leiden: KITLV Press, h. 15-88.

masa kolonial. Mereka kemudian dikenal sebagai sejarawan mahzab Batavia, yakni sebuah kelompok sejarawan yang mencurahkan perhatiannya untuk menerbitkan sumber-sumber sejarah berupa arsip. Di antara anggotanya yang terkemuka adalah Mr. J.A. van der Chijs, Ds. J.Mooij, dan Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins.⁴ Mereka menolak karya sejarah yang menggunakan sumber non arsip seperti buku harian para pelancong Eropa dan sumber-sumber historiografi Bumiputera. Sebelum karya De Jonge terbit, penulisan sejarah berdasarkan sumber Bumiputera pernah dilakukan oleh Sir Thomas Satmford Raffles, Letnan Gubernur Inggris untuk Pulau Jawa dan sekitarnya yang berkuasa dari tahun 1811 hingga 1816. Ia menyusun buku sejarah Jawa berdasarkan informasi dari Panembahan Sumenep dan mengabaikan sumber-sumber dari arsip VOC.⁵

Intermezo Max Havelaar dan munculnya Mazhab Leiden

Sejumlah perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial dilancarkan para tokoh Bumiputera di beberapa daerah sehingga menguras dana pemerintah untuk memadamkannya. Di antara yang terbesar adalah perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830). Akibatnya pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Untuk mengatasinya, para

elite politik di negeri Belanda terbelah dua. Pertama, mengembangkan kembali pelayaran dan perdagangan laut yang pernah dilakukan VOC. Kedua, mengelola sektor penanaman daerah jajahan. Perdebatan ini dimenangkan pendapat kedua karena mendapat dukungan dari Kerajaan Belanda. Tokoh utama pendapat kedua, Johannes Graaf van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1830. Ia langsung menerapkan strategi pengembangan Hindia Belanda berdasarkan Cultuurstelsel. Kebijakannya dilanjutkan oleh para gubernur jenderal Hindia Belanda yang menggantikannya karena sistem ini meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial dan keuangan Kerajaan untuk membangun negeri Belanda.⁶

Kebijakan cultuurstelsel dihentikan setelah terbitnya konstitusi kolonial yang baru, Regeering Reglement pada tahun 1848 yang sangat dipengaruhi gagasan liberalisme seperti kebebasan individu dan persaingan bebas yang membatasi campur tangan pihak Kerajaan. Konstitusi baru ini menghilangkan politik merkantilisme dan proteksionisme yang melindungi hak-hak istimewa perusahaan-perusahaan besar di bawah perlindungan Kerajaan. Dengan dihapuskannya Cultuurstelsel secara berangsur-angsur maka tanaman wajib pemerintah diganti dengan perkebunan-

⁴ Ibid., h. 23.

⁵ Karya Raffles ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2008 oleh Eko Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Idda Qoryati Mahmudah. Lihat Thomas Stamford Raffles, 2008, *The History of Java*, Yogyakarta: NARASI.

⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid V: edisi pemutakhiran, Jakarta: Balai Pustaka, h. 2-3. Untuk pembahasan Cultuurstelsel secara khusus lihat Rabert van Niel, 2003, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES.

perkebunan yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha swasta.⁷

Kehancuran Cultuurstelsel semakin sempurna setelah terbitnya novel berjudul *Max Havelaar of de koffie-veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij* (Max Havelaar atau pelanggaran-pelanggaran kopi perusahaan Belanda) pada tahun 1860.⁸ Novel ini ditulis Multatuli, sebuah nama samaran Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Ia mantan pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat Cultuurstelsel diterapkan. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Residen Rembang. Setelah pension ia mengeritik kebijakan cultuurstelsel melalui kisah penentangan Asisten Residen Lebak bernama Max Havelaar terhadap tindakan Bupati Lebak. Namun penentangannya sia-sia karena Residen maupun Gubernur Jenderal yang menjadi atasannya berpihak kepada Bupati Lebak. Max Havelaar kemudian dimutasi ke daerah lain yang mendorongnya untuk mengundurkan diri. Kisah Max havelaar sangat mirip dengan perjalanan karir Douwes Dekker sehingga novel yang ditulisnya merupakan sebuah novel sejarah, yakni kisah yang berdasarkan fakta masa lalu.

Penerbitan novel Max Havelaar mendorong wartawan Belanda Mr. P. Brooshooft berlayar dari Belanda ke Hindia Belanda pada tahun 1877.

Kedatangannya juga berkaitan dengan berkembangnya penolakan 180 tokoh Batavia terhadap rencana pemerintah Belanda untuk menerapkan kebijakan pajak paten dan pajak rumah tangga dari orang-orang Eropa dan Timur Asing yang menetap di Hindia Belanda. Kebijakan baru ini bertujuan untuk menutupi masalah keuangan yang dihadapi pemerintah kolonial. Para tokoh Batavia mengirim surat kepada Raja Belanda untuk meminta dukungannya menentang rencana kebijakan pemerintah Belanda. Di antara tokoh Batavia itu adalah Mr. N.P. van den Berg, Presiden Javasche Bank. Pada tahun 1878 ia menerbitkan tulisannya *Miss het protes tegen de "Bijdrage" een op recht en billijkheid grondslag?* (Apakah protes terhadap "Sumbangan Wajib" tidak memiliki dasar yang bersandar pada hukum dan keadilan?). Menurut pemerintah Belanda harus meminjamkan dana untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami kolonia Hindia Belanda. Berita inilah yang pertama kali diliput Brooshooft.⁹

Pada tahun 1885 Brooshooft kembali ke negeri Belanda. Dua tahun kemudian kembali ditugaskan ke Hindia Belanda sebagai redaktur koran *De Locomotief* yang terbit di Semarang. Pada tugas keduanya inilah (1887-1895) ia memperjelas keberpihakannya kepada tuntutan para tokoh Batavia agar pemerintah Belanda meminjamkan dana bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia

⁷ Sartono Kartodirdjo, 1992, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, h. 18-19.

⁸ Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Andi Tenri W pada tahun 2008. Lihat Multatuli, 2008, *Max Havelaar*, Yogyakarta: NARASI.

⁹ Elsbeth Locher-Scholten, "Mr. P. Brooshooft: Sketsa Biografis dalam Perspektif Etnis-Kolonial" dalam Elsbeth Locher-Scholten, 1996, *Etika Yang Berkeping-Keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etnis Dalam Politik Kolonial 1877-1942*, Jakarta: Djambatan, h. 5-9

Belanda. Ia menyebutkan kewajiban pemerintah Belanda memenuhi tuntutan ini sebagai *eereschuld* (hutang budi) pada tahun 1890.¹⁰ Namun istilah *eerschuld* menjadi sangat populer setelah terbitnya artikel Mr. C.Th. van Deventer, “Een Eerschuld” (Hutang Budi) dalam majalah *De Gids* pada tahun 1899. Satu tahun sebelumnya Brooshooft sudah bertugas kembali di Hindia Belanda. Ia menerbitkan artikel van Deventer secara utuh dalam *De Locomotief*. Pada tahun 1903, ia merangkum seluruh gagasannya agar pemerintah Belanda membayar hutang budinya dalam satu brosur yang ditulisnya di negeri Belanda dengan judul, *De Etische koers in de koloniale politiek* (Haloan etis dalam politik kolonial). Gagasannya melahirkan istilah ‘etische politiek’ (politik etis) yang kemudian digunakan untuk menamai kebijakan pemerintah Belanda dalam mengelola wilayah koloni di Hindia Belanda pada dekade 1900-an.¹¹

Pada dasarnya, politik etis merupakan kebijakan yang bertujuan melebarkan kekuasaan nyata Belanda atas seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan mengembangkan negeri dan bangsa wilayah ini menuju pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Belanda dan menurut model Barat.¹² Politik etis memberikan harapan baru bagi para elite politik di Hindia Belanda dan mendorong tumbuhnya gagasan Hindiasentris dalam pemerintahan maupun

ekonomi. Gagasan ini disebarkan majalah *De Stuww*, sebuah majalah yang terbit dua minggu sekali. Majalah ini didirikan pada 15 Maret 1930 oleh sebuah perkumpulan untuk memajukan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Hindia-Belanda. Perkumpulan ini dipelopori elite Hindia Belanda yang terkemuka seperti anggota *Volksraad* nonpartai Mr. J.A. Jonkman, guru besar sekolah tinggi hukum Prof. Mr. F.M. Baron van Asbek dan Prof. Mr. B. Ter Haar, Direktur *Kantoor voor Volksliteratuur* (Balai Pustaka) Dr. G.W.J. Drewes, Presiden Direktur *Volkscredietbank* (Bank Perkreditan Rakyat) dan Direktur Kas Sentral Mr. Th. A. Fruin, Asisten-Residen Polisi di Batavia H.J. van Mook.¹³

Di negeri Belanda, politik etis mengubah perspektif sejarawan Leiden terhadap masa lalu kebijakan kolonial pemerintah Belanda di Hindia. Tokoh utamanya adalah H.T. Collenbrander, seorang guru besar sejarah di *Universiteit Leiden* yang menganut liberalisme.¹⁴ Ia dan sejarawan mazhab Leiden lainnya memberikan gambaran yang sangat negatif terhadap kebijakan *Cultuurstelsel*.¹⁵

Munculnya Mazhab Utrecht

Perspektif negative mazhab Leiden terhadap periode *Cultuurstelsel*

¹⁰ Ibid., h. 31.

¹¹ Ibid., 45-46.

¹² Elsbeth Locher-Scholten, “Politik Etis, Gambaran Yang Sudah Berkeping-Keping” dalam Elsbeth Locher-Scholten, *ibid*, h. 270

¹³ Elsbeth Locher-Scholten, “De Stuww, Gambaran Zaman, Tanda Zaman” dalam Elsbeth Locher-Scholten, *ibid*, h. 150-151.

¹⁴ Di antara karya sejarah Colenbrander; 1918, *Nederland's Betrekking tot Indië in Verleden en toekomst* (Leiden: tp); 1919-1953, Jan Pieterszoon Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië (s’Gravenhage), 7 jilid; 1925-1926, *Koloniale Geschiedenis* (s’Gravenhage), 3 jilid.

¹⁵ Klooster, 1985, h. 15-16.

dikritik pada tahun 1925 oleh C. Gerretson, guru besar sejarah dari Utrecht. Ia memberikan interpretasi positif terhadap periode Cultuurstelsel sebagai 'grote segen' (berkas besar) dan tindakan Jan Pieterszoon Coen, pendiri Batavia sebagai 'eerherstel' (pemulihan kehormatan). Penilaiannya sangat bertolak belakang terutama dengan Collenbrander yang menerbitkan sisi gelap Coen di Hindia Timur.¹⁶ Pandangan Geretson mendapat dukungan para sejarawan dari Universitas Utrecht sehingga pandangannya dikenal sebagai mazhab Utrecht. Fokus perhatian mereka adalah masalah-masalah kolonial, sementara mazhab Batavia lebih memperhatikan manusia-manusia kolonial.¹⁷

Pembelaan mazhab Utrecht terhadap masa lalu Belanda di Hindia memperkuat keyakinan pemerintah Belanda untuk mengakhiri kebijakan politik etis. Empat tahun sebelum Geretson melancarkan kritiknya terhadap mazhab Leiden, pemerintah telah mengangnti Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum yang dikenal sebagai pendukung liberalisme dan politik etis dalam mengelola tanah jajahan. Penggantinya adalah Mr.Dr. Dirk Fock yang menentang liberalisme maupun politik etis. Fock digantikan para tokoh anti liberalisme dan politik etis lainnya seperti Andries Cornelies Dirk de Graeff; Bonifacius Cornelis de Jonge dan A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang

terpaksa menghabiskan bagian akhir periode pemerintahannya di pengasingan karena Hindia Belanda dikuasai pasukan Jepang pada bulan Maret 1942.

Buku babon Belandasentris

Tiga tahun sebelum dikalahkan pasukan Jepang, pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menerbitkan buku sejarah yang ditulis berdasarkan perspektif Belandasentris, yakni *Geschiedenis van Nederlands-Indië* (Sejarah Hindia Belanda). Buku yang terdiri dari enam jilid ini diterbitkan secara bertahap pada tahun 1938, 1939, dan 1940. Editor utamanya adalah Dr. F.W. Stapel, sejarawan kolonial yang banyak menulis buku sejarah untuk kepentingan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Hingga sekarang buku disusun secara kronologis ini dinilai sebagai "titik puncak historiografi kolonial Belanda".¹⁸

Pembahasannya diawali dengan masa prasejarah di Indonesia. Pokok bahasan ini ditulis oleh Dr. A.N.J. Thomassen A. Thuessink van der Hoop. Periode prasejarah berakhir dengan dikenalnya tulisan yang memberitakan keberadaan kerajaan Hindu di Jawa Barat dan Kalimantan. Penulisnya adalah Prof. Dr. N.J. Krom. Masa Hindu berakhir dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam. Pokok bahasan ini ditulis oleh R.A. Kern yang berkeyakinan bahwa agama Islam di Indonesia berkembang

¹⁶ Colenbrander; 1919-1953, Jan Pieterszoon Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië (s'Gravenhage), 7 jilid.

¹⁷ H.J. De Graaf, 1971, h. 27

¹⁸ Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, 2008, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: OBOR dan KITLV – Jakarta, hal. 6.

pada abad ke-13 masehi dan penyebarannya berasal dari India. Keyakinan ini berdasarkan hasil temuan arkeologis berupa batu nisan para sultan.

Sebagian besar pokok bahasan tertuju pada Pulau Jawa sehingga tidaklah mengherankan apabila historiografi Jawa mendapat perhatian khusus pada jilid kedua, yakni *Javaansche Geschiedschrijving* yang ditulis oleh Prof. Dr. C.C. Berg. Dalam jilid dua ini pula pokok bahasan beralih dari sejarah bangsa Indonesia menjadi sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Awal pembahasan dimulai dengan tulisan C. Wessels S.J yang membahas kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Periode selanjutnya adalah kedatangan bangsa Perancis, Inggris dan Belanda yang ditulis oleh Dr. H. Terpstra.

Bab ketiga lebih memfokuskan pada kegiatan bangsa Belanda membangun wilayah koloni Hindia Belanda melalui pembentukan VOC. Penulisnya adalah Dr. F.W. Stapel. Ada dua pokok bahasan, yakni *De Oprichting Der Vereenigde Oostindische Compagnie* dan *De Nederlandsch Oostindische Compagnie in De Zeventiende Eeuw*. Pembahasannya berakhir pada abad ke-17. Untuk abad ke-18 dibahas dalam jilid empat oleh Prof. Dr. E.C. Godee Molsbergen.

Memasuki abad ke-19 terjadi perubahan pemerintahan dari Belanda ke Perancis, dari Perancis ke Inggris, dan dari Inggris ke Belanda kembali. Perubahan ini dibahas dalam jilid lima dan ditulis oleh Dr. F.W. Stapel. Pembahasan diawali dengan pendirian Republik Batavia oleh pemerintah

Perancis. Masa modern, yakni abad ke-20 dibahas pada jilid enam oleh Dr. I.J. Brugmans, yakni *De Moderne Tijd En Zijn Uitingen in Indië*. Namun jilid ini tidak pernah diselesaikan karena wilayah Hindia Belanda dikuasai pasukan Jepang pada bulan Maret 1942, dan pemerintah kolonial menyingkir ke Australia.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hanya jilid pertama yang membahas sejarah bangsa Indonesia. Penukisnya menempatkan bangsa Indonesia pada kedudukan sebagai pemegang peranan utama. Peranan ini segera bergeser menjadi 'peranan figuran' karena posisinya digantikan oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda. Dengan demikian, sejarah Indonesia ditulis berdasarkan perspektif Eropa (Eropasentris) dan Belanda (Belandasentris). Dalam perspektif ini, bangsa Eropa khususnya Belanda ditempatkan sebagai pembangun peradaban yang memberikan pencerahan dan kemajuan. Sementara bangsa Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri.

Kesimpulan

Historiografi Belandasentris dikembangkan pertama kali oleh sekelompok sejarawan yang bekerja sebagai arsiparis pada Arsip Kerajaan Belanda. Tokoh utamanya adalah J.K.J. De Jonge dan Kepala Arsip Negara di Batavia, F. de Han. Pengikut keduanya membentuk cara pandang sejarah berdasarkan arsip. Karena mereka berpusat di Batavia, maka mereka dikenal sebagai mazhab Batavia dalam sejarah pengembangan

historiografi di Hindia Belanda. Mereka menjadikan arsip sebagai sumber utama dan pada saat bersamaan mengabaikan sama sekali sumber-sumber non arsip. Prinsip ini mengakibatkan penulisan sejarah didominasi oleh kegiatan bangsa-bangsa Eropa khususnya Belanda karena kegiatan mereka ditulis dan dijadikan arsip. Sementara kegiatan bangsa Indonesia sangat jarang ditulis. Peminggiran bangsa Indonesia dalam penulisan sejarah diperkuat dengan penggunaan perspektif Belandasentris dalam menjelaskan sumber-sumber arsip tersebut.

Historiografi Belandasentris yang dirintis mazhab Batavia kemudian dikembangkan oleh sejarawan-sejarawan Belanda yang bekerja kepada pemerintah kolonial seperti Dr. F.W. Stapel. Ia berhasil mengumpulkan sejarawan lainnya untuk menyusun buku *Geschiedenis van Nederlands-Indië* (Sejarah Hindia Belanda). Buku ini merupakan buku babon historiografi Belandasentris.

Daftar Pustaka

- Colenbrander; 1918, *Nederland's Betrekking tot Indië in Verleden en toekomst* (Leiden: tp); .
- _____, 1953, Jan Pieterszoon Coen, bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië (s'Gravenhage), 7 jilid;
- _____, 1925-1926, *Koloniale Geschiedenis* (s'Gravenhage), 3 jilid.
- De Graaf, H.J., 1971, *Historiografi Hindia Belanda*, (Djakarta: Bhratara),
- Nagtegaal, Luc, 1996, *Riding The Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the northeast coast of Java 1680-1743*, Leiden: KITLV Press.
- Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, 2008, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: OBOR dan KITLV – Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia.
- Locher-Scholten, Eslbeth, 1996, *Etika Yang Berkeping-Keping: Lima Telaah Kajian Aliran Ets Dalam Politik Kolonial 1877-1942*, Jakarta: Djambatan.
- Multatuli, 2008, *Max Havelaar*, Yogyakarta: NARASI.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 2008 (edisi pemuthakiran), *Sejarah Nasional Indonesia Raffles*, Thommas Stamford, 2008, *The History of Java*, Yogyakarta: NARASI.
- Van Niel, Rabert, 2003, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES.